

Dinasti Politik pada Pemilihan Bupati Kabupaten Batanghari 2020: Analisis Perilaku Pemilih

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2021, Vol. 11, No. 1: 111-132
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2021

Hatta Abdi Muhammad*

Universitas Jambi, Indonesia

Dony Anggara

Universitas Jambi, Indonesia

Abstrak

Fenomena dinasti politik merupakan salah satu topik penting dalam kajian politik di Indonesia. Artikel ini memfokuskan kajiannya pada upaya pelanggaran kekuasaan dari dua tokoh elit politik di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, melalui representasi dinasti politiknya. Melalui penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menunjukkan bahwa dalam konteks kontestasi politik di Kabupaten Batanghari, kuatnya dinasti politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh karakteristik masyarakat yang masih tradisional. Keadaan ekonomi masyarakat yang memprihatinkan secara tidak langsung mendorong pelanggaran kekuasaan politik lokal. Hal ini berdampak pada terbentuknya budaya politik masyarakat secara pragmatis. Rasionalitas dalam memilih cenderung terabaikan sehingga masyarakat lebih menyukai hal-hal praktis yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara langsung.

Kata-kata Kunci

Politik kekerabatan, dinasti politik, perilaku pemilih, Pemilu, Kabupaten Batanghari

Abstract

The phenomenon of political dynasty is one of important topics in political studies in Indonesia. This article examines how political elite attempt to preserve their power with a special reference to the case of Batang Hari regency in Jambi province, Indonesia. Using descriptive qualitative method, this article shows that political dynasty is made possible due to economic factors as

* Penulis untuk korespondensi:

Hatta Abdi Muhammad

Department of Political Science, Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia

Address: Jalan Jambi-Muara Bulian KM 15, Mandalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia

Email: hattaabdimuhammad@unja.ac.id

well as traditional characteristics of voters. Accute social and economic condition facing communities such as low income and education contributed to the the rise and preservation of elite's political dynasty. All this has resulted in the pragmatic and instant attitude within communities and the irrationality of voters' behavior that in turn provided elite with opportunities to maintain their political dynasty.

Key Words

Kinship politics, political dynasty, voting behavior, election, Batanghari Regency

Pendahuluan

Pasca kejatuhan 32 tahun rezim Soeharto pada 1998, sistem politik Indonesia bertransformasi dari rezim sentralistik otoriter menjadi pemerintahan demokratis yang tidak sentralistik. Salah satu kunci utama proses desentralisasi di Indonesia adalah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menstimulus percepatan implementasi desentralisasi. Melalui proses desentralisasi, transfer politik, kekuasaan finansial dan administrasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Hamid 2015).

Kemudian, kebijakan desentralisasi menghasilkan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Masyarakat dapat secara langsung memilih pemimpin di daerah di mana mereka tinggal tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya ketika Pilkada hanya dilaksanakan oleh segelintir elit partai politik melalui lembaga DPRD. Pilkada langsung merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan dapat mereduksi adanya “pembajakan kekuasaan” oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD (Hanafi 2014).

Pada awalnya, Pilkada langsung diharapkan menjadi tonggak demokratisasi masyarakat di tingkat akar rumput (*grass root*) melalui peningkatkan kesadaran partisipasi politik untuk menentukan masa depan daerah ke arah stabilitas politik. Namun, hingga saat ini, harapan mewujudkan demokratisasi masyarakat melalui pilkada langsung ternyata sulit tercapai. Faktanya, Pilkada langsung, yang awalnya diharapkan dapat menghentikan intervensi pihak mana pun, masih didominasi oleh campur tangan elit partai politik. Hal ini terjadi dalam beberapa kasus pada saat

penetapan pasangan calon kepala daerah. Elit partai politik di tingkat pusat memiliki kewenangan besar dalam penetapan tersebut. Hasilnya, kemudian cenderung bersifat oligarkis, dibanding demokratis. Campur tangan partai politik tersebut kerap menuai kritik publik karena melibatkan banyak isu-isu negatif seperti proses pengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, isu mahar politik dalam pencalonan, pengabaian suara publik terhadap politik kekerabatan di daerah, dan bagaimana partai politik bisa bekerja dalam mengawal pengusungan kandidat sebagai sebuah mesin politik yang efektif agar tidak sekadar menjadi pemberi tiket.

Melalui proses tersebut, calon yang tidak memiliki modal besar dan hak istimewa (*privilege*) secara otomatis akan tersingkir sedangkan calon yang mempunyai modal besar bisa dengan mudah dicalonkan. Akibatnya, banyak kepala daerah yang berasal dari golongan elit kembali mencalonkan diri sebagai petahana (*incumbent*) untuk memenuhi batasan dua periode jabatan. Setidaknya terdapat 290 calon kepala daerah petahana yang maju kembali di 236 daerah (“290 Calon Petahana Maju Pilkada di 236 Daerah”).

Hal yang sama terjadi pula dalam Pilkada di Kabupaten Batanghari tahun 2020. KPU Kabupaten Batanghari sudah menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Gambaran latar belakang ketiga pasangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Pasangan pertama dengan nomor urut 1, Yunninta Asmara dan M. Mahdan, merupakan anggota aktif DPRD Kabupaten Batanghari Periode 2019-2024. Yunninta Asmara menjabat sebagai Wakil Ketua I sekaligus istri Bupati Batanghari aktif dua periode, yakni Syahirsyah. Mahdan tergabung dalam Komisi I dari Fraksi PAN dan pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Batanghari pada periode sebelumnya. Mahdan juga merupakan adik ipar Wakil Bupati Batanghari periode 2013-2016, Sinwan, yang berpasangan dengan Abdul Fattah. Mahdan juga pernah terpilih sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Sinwan di DPRD Batanghari.

Pasangan kedua dengan nomor urut 2 adalah Firdaus Fattah dan Camelia Puji Astuti. Firdaus sebelumnya menggantikan Hafiz yang gagal mencalonkan diri sebagai bupati dan keduanya merupakan putra dari mantan Bupati Batanghari dua periode, yakni Abdul Fattah (2001-2013). Sama halnya dengan Firdaus, Camelia juga merupakan putri mantan Bupati Batanghari periode 1980-1991 dan Wakil Gubernur Jambi Periode 1994-2004, Hasip Kalimuddin Syam. Camelia juga tercatat sebagai anggota DPRD Batanghari Periode 2019-2024 dari Fraksi Demokrat.

Pasangan terakhir dengan nomor urut 3, Muhammad Fadhil Arief dan Muhammad Bakhtiar, memiliki latar belakang birokrat dengan jabatan sekretaris daerah (Sekda). Fadhil Arief menjabat sebagai Sekda Kabupaten Muaro Jambi dan Bakhtiar menjabat sebagai Sekda Kabupaten Batanghari. Fadhil Arief dan Bakhtiar ini merupakan satu-satunya pasangan calon yang dianggap bebas dari dinasti politik.

Artikel ini berusaha mengkaji fenomena dinasti politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Batanghari ini. Kabupaten Batanghari menarik untuk dibahas karena pada pilkada tahun 2020 praktik kekerabatan politik melalui dinasti politik dua tokoh elit lokal Batanghari kembali berlangsung dengan pola baru. Konstruksi dinasti memainkan sistem representasi politik yang dikolaborasikan melalui mekanisme kekerabatan politik.

Untuk memahami kontestasi kekuasaan di daerah tersebut, dengan melakukan penelitian kualitatif deskriptif, artikel ini menggunakan kombinasi antara informasi sekunder dari berbagai sumber dan data primer dari hasil observasi, wawancara mendalam terhadap informan dari berbagai kalangan, baik pengamat politik lokal, dan tokoh masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam mengapa faktor budaya masyarakat berpengaruh kuat terhadap munculnya dinasti politik di Batanghari. Penentuan informan didasarkan pada pemahaman terhadap data yang diambil dari beberapa level (kecamatan dan desa), sejumlah kalangan dan pemangku kepentingan di masyarakat. Kami mengambil beberapa perwakilan yang dianggap memiliki kemampuan dalam memberikan informasi yang objektif.

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa penting mengkaji dinasti politik pada pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020. Pertama, Batanghari telah lama didominasi oleh dua tokoh politik lama yang menjadi tonggak terbentuknya dinasti politik, yakni Abdul Fattah dan Syahirsyah. Keduanya masih bertarung untuk kembali membangun dinasti politiknya melalui representasi politik mereka. Kedua, terdapat upaya membangun dinasti politik lama dengan yang baru melalui pola kekerabatan politik, yaitu pasangan calon Yuninnta Asmara (istri Syahirsyah) yang berkolaborasi dengan Mahdan (Sinwan) dan pasangan calon Firdaus Fattah (anak Abdul Fattah) dengan Camelia Puji Astuti (anak Hasip Kalimuddin Syam). Ketiga, poros baru sebagai penantang selalu muncul sebagaimana pilkada sebelumnya, tetapi selalu gagal menumbangkan kandidat dinasti yang silih berganti antara Abdul Fattah dan Syahirsyah. Pasangan Fadhil Arief dan Bakhtiar mulai masuk dalam kontestasi sebagai penantang baru yang berasal dari kalangan birokrat aktif yang dianggap tidak memiliki

representasi dinasti politik. Keempat, perilaku pemilih di Kabupaten Batanghari dalam menanggapi dinasti politik tersebut.

Literatur terdahulu telah banyak membahas mengenai awal mula munculnya dinasti politik. Asako (2010) dan McCoy (1994) dalam Rosalina (2018) menemukan bahwa tumbuhnya dinasti politik disebabkan karena adanya kolusi bisnis-politik di tingkat lokal. Dalam hal ini, jejaring keluarga telah menguasai berbagai proyek pembangunan daerah yang kemudian dibagi-bagikan kepada kroni-kroninya. Dinasti politik berperan sebagai patron dalam menjaga stabilitas kolusi tersebut dengan menempatkan sanak-familinya ke dalam jajaran perusahaan maupun pemerintahan. Konsep seperti ini kemudian yang menjadi awal mula terbentuknya raja-raja kecil dan mempertajam iklim dinasti politik kedaerahan.

Selain itu, kajian Effendi (2018) mencatat tentang dinasti politik di Banten sebelum menempatkan Ratu Atut sebagai gubernur dua periode. Semuanya diawali dari faktor sejarah dan ekonomi politik. Chasan Sochib, ayah Ratu Atut, merupakan elit politik sekaligus pengusaha biasa menjalin hubungan erat dengan perwira militer dan petinggi Golkar Banten yang dulunya merupakan penguasa lokal Banten. Pasca keruntuhan orde baru, Chasan Sohib juga merupakan aktor utama terbentuknya Provinsi Banten. Sukri (2020) menjelaskan munculnya dinasti politik di Banten tidak terlepas dari kaitan antara familisme, strategi politik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat.

Penelitian serupa dilakukan oleh Melvin P. Hutabarat (2012) yang membahas tentang orang kuat di tingkat lokal yang membentuk dinasti politik di Provinsi Jambi. Dimulai dari sosok Zulkifli Nurdin yang merupakan pengusaha pribumi yang mewarisi jaringan bisnis sang ayah, Nurdin Hamzah. Selain menjabat sebagai Gubernur Jambi dua periode (1999-2004 dan 2005-2010), Zulkifli Nurdin juga berhasil menempatkan adik kandungnya, Hazrin Nurdin menjadi ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Ratu Munawaroh (istri) sebagai anggota DPR RI (2009), Zumi Zola (anak) sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur 2011-2015 dan Gubernur Jambi 2016-2018, dan Sum Indra (keponakan) sebagai Wakil Walikota Jambi periode 2008-2013 dan Anggota DPD-RI periode 2019-2024.

Senada dengan Hutabarat, penelitian Suaib dan Zuada (2015) juga membahas bagaimana hegemoni politik yang dilakukan Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode hingga membentuk sebuah dinasti politik. Sebelum menjadi politisi dan membentuk sebuah dinasti politik, Nur Alam dikenal sebagai “bos lokal” yang merintis usaha sejak zaman orde baru hingga terpilih sebagai Ketua Gapensi Sultra. Karir politik Nur Alam pun kemudian melejit. Ia terpilih menjadi Ketua

DPW PAN. Ia memiliki pengaruh besar dalam memuluskan karir politik kakak kandungnya sebagai calon bupati Konawe periode 2015-2020 dan mempersiapkan istrinya, Asnawati Hasan, untuk maju sebagai Gubernur Sultra 2018.

Kajian-kajian di atas menjelaskan munculnya dinasti politik yang dipengaruhi oleh faktor sejarah dan ekonomi politik melalui penguasaan sektor ekonomi dan pengaruhnya di berbagai bidang. Kekurangan beberapa penelitian terdahulu tersebut kiranya adalah belum membahas kemunculan dinasti politik di luar faktor ekonomi politik dan sejarah. Artikel ini menjelaskan dinasti politik dari perspektif budaya, terutama sikap masyarakat yang cenderung masih tradisional.

Masyarakat Kabupaten Batanghari pasca Orde Baru hampir selalu disuguhkan pemandangan politik pemilihan Bupati yang hanya diikuti oleh dua aktor lokal, yaitu Abdul Fattah dan Syahirsyah. Keduanya sama-sama memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh besar dalam menggerakkan masyarakat untuk memenangkan suara pemilihan. Hal ini sejalan dengan konsep perilaku pemilih yang menyatakan bahwa sikap loyal pada ketokohan figur tertentu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih (Mujani dkk. 2012).

Karena itu, artikel ini berargumen bahwa faktor budaya masyarakat setempat dapat mempengaruhi keberlangsungan dinasti politik yang dibangun oleh lingkungan keluarga elit tertentu. Dalam konteks perilaku pemilih, karakteristik masyarakat Batanghari masih sangat tradisional. Masyarakat menyadari bahwa dinasti politik telah terbangun di daerahnya sejak lama dan diwakili oleh kandidat yang sama. Padahal pada setiap kontestasi pilkada selalu ada poros baru yang bertarung untuk memperjuangkan arah baru sistem kekuasaan di Batanghari.

Diskusi artikel ini dimulai dengan penjabaran tentang dinasti politik dan perilaku pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang dinamika kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Batanghari yang dipengaruhi oleh adanya dinasti politik dikaitkan dengan karakteristik perilaku pemilih masyarakat.

Dinasti Politik dan Perilaku Pemilih

Bo dkk. (2009) menyatakan bahwa kekuasaan yang lama memungkinkan siapa pun untuk memulai atau melanjutkan dinasti politik. Kekuasaan yang lama itu, sebagaimana dinyatakan Geys dan Smith (2017), kemudian berimplikasi pada upaya elit untuk mempertahankan cengkeraman keluarga

dalam jabatan politik, terutama jika keuntungan pribadi dari jabatan itu melebihi apa yang dapat diperoleh di luar politik. Secara umum, kekayaan, pendidikan, dan koneksi yang dinikmati dalam keluarga elit terkemuka dapat membantu mereka mempertahankan cengkeraman kekuasaan, bahkan ketika dihadapkan pada persaingan elektoral. Bo dkk. (2009) menjelaskan bahwa legislator yang menjabat beberapa kali masa jabatan meningkatkan kemungkinan kerabat mereka dipilih untuk jabatan yang sama pada periode berikutnya. Ini sebagian karena modal politik seperti pengakuan nama dan koneksi mesin politik, yang dapat diwarisi keluarga.

Menurut Feinstein (2010), keunggulan sumber daya yang dimiliki dinasti politik dapat memberikan keunggulan elektoral substansial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Karena itu, fenomena kekerabatan politik dinilai dapat berpotensi menghambat jalannya sirkulasi politik yang terbuka dan partisipatif (Prianto 2016). Dengan demikian, dapat dipahami bila kekuasaan politik di tingkat lokal seringkali dianggap oleh elit lokal sebagai warisan turun-temurun dinasti politik. Inilah yang dalam istilah Bo dkk. (2009) disebut sebagai “kekuasaan yang akan melahirkan kekuasaan.”

Besley dan Querol (2013) mendefinisikan dinasti politik sebagai situasi ketika seorang pemimpin memiliki koneksi dengan keluarga yang pernah memegang posisi politik (ayah, ibu, kakek, paman, saudara laki-laki, sepupu, ipar dan lain-lain). Querubin (2011) mendefinisikan dinasti politik sebagai satu atau sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan di wilayah geografis tertentu. Di sisi lain, Kenawas (2014) dalam kajiannya menjelaskan bahwa politik dinasti dilakukan oleh pejabat publik terpilih (gubernur, walikota, bupati atau legislator) yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petahana di tingkat yang sama, lebih rendah, atau lebih tinggi (kabupaten ke provinsi) berdasarkan hubungan perkawinan, garis keturunan vertikal atau keluarga besar.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Batanghari Tahun 2020, terdapat upaya membangun dinasti politik lama dengan yang baru melalui pola kekerabatan politik, yaitu pasangan calon Yuninta Asmara (istri Syahirsyah) berkolaborasi dengan Mahdan (Sinwan) dan pasangan calon Firdaus Fattah (anak Abdul Fattah) dengan Camelia Puji Astuti (anak Hasip Kalimuddin Syam).

Selain itu, penting dijelaskan tentang perilaku pemilih untuk membaca kecenderungan politik dinasti di Kabupaten Batanghari. Kristiadi (1996) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum yang dipengaruhi oleh tiga faktor atau pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis,

psikologis dan logika rasional pemilih (*voting behavioral*). Senada dengan Kristiadi, Asfar (2006) mencatat perilaku pemilih didasarkan pada tiga model pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional. Bartels (2010) dan Roth (2008) dalam Haryanto (2014) juga menjelaskan terdapat tiga pendekatan yang selama ini menjadi basis membaca perilaku pemilih, yaitu *the Columbia Study* (pendekatan sosial), *Michigan Model* (pendekatan psikologis) dan *Rational Choice* (pendekatan rasional).

Pendekatan sosiologis yang dipelopori oleh *Columbia Study* memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh nilai-nilai sosiologis yang menempel pada diri individu sehingga mempengaruhi perilaku seseorang dalam politik. Nilai-nilai sosiologis tersebut berupa agama, kelas sosial, etnis, daerah, tradisi keluarga dan lain-lain (Bartels 2010). Pendekatan sosiologis, menurut Kristiadi (1996), lebih kompleks karena difokuskan pada karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, yaitu jenis usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang, keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal yang dianggap cukup signifikan dalam pembentukan perilaku pemilih.

Pendekatan perilaku pemilih selanjutnya ialah pendekatan psikologis yang dipelopori oleh *Michigan Model*, yakni adanya keterikatan atau dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang. Ikatan psikologis tersebut disebabkan oleh adanya perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat (Haryanto 2014). Pendekatan psikologis timbul karena pemahaman kolektif yang dibangun oleh pemilih terhadap pasangan calon. Hal ini tidak bisa terbangun dengan seketika atau dalam waktu yang singkat karena ada proses psikologis yang menjadi bangunan dasar seseorang atau pemilih untuk mengetahui dan memahami pasangan calon. Pendekatan psikologis yang dimaksud merupakan pendekatan dalam melihat perilaku pemilih sebagai bentukan proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan (Mas'udi dkk. 2018).

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan model pilihan rasional (*rational choice*). *Rational choice* adalah pendekatan perilaku pemilih yang melihat bahwa pilihan pemilih adalah keputusan rasional pemilih berupa pertimbangan orientasi visi misi, prestasi kandidat, kedudukan informasi dan popularitas pribadi (Mas'udi dkk. 2018). Dalam konteks awal munculnya dinasti politik di Batanghari, pilihan masyarakat tidak hanya berfokus pada faktor ekonomi individu elit, tetapi juga sikap politik mereka. Hal ini terkait dengan perilaku pemilih di masyarakat yang secara sosiologis menerima adanya praktik dinasti politik di Batanghari

yang terus bertahan hingga saat ini. Bahkan belakangan terdapat upaya untuk memperluas dinasti politik itu melalui pola kekerabatan politik yang dibangun oleh representasi tokoh elit politik sebelumnya dalam mewariskan dinasti politiknya pada pemilihan Bupati Batanghari tahun 2020.

Kondisi Sosial Politik Kabupaten Batanghari

Pada masa reformasi, Kabupaten Batanghari mengalami dinamika kontestasi politik Pilkada yang menarik untuk dikaji. Kemunculan era desentralisasi justru memperkuat kekuatan politik lama untuk hadir kembali. Reformasi mengalami demobilisasi dan domestikasi. Tidak ada perbedaan gagasan substantif dari elit-elit lama yang bertarung di era desentralisasi (Hutabarat 2021). Dinamika tersebut memunculkan fenomena kekuasaan politik yang dijalankan oleh dua orang tokoh silih berganti memimpin dan mendominasi pemerintahan sejak tahun 2001 hingga 2020, yakni H. Abdul Fattah dan Ir. Syahirsah (Tabel 2). Memang sempat ada sosok Sinwan yang menyelang menjadi Bupati Batanghari 2013-2016 menggantikan posisi Abdul Fattah di tengah kepemimpinannya yang divonis bersalah atas kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2004.

Abdul Fattah mengawali karirnya sebagai seorang birokrat dan kemudian beralih menjadi politisi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Batanghari dan tercatat pernah menjadi ketua dan menduduki jabatan penting di beberapa partai, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Abdul Fattah juga dikenal sebagai pengusaha minyak yang sukses. Ia memiliki beberapa SPBU dan pernah menjabat sebagai Ketua Hiswana Migas. Sosok Syahirsah juga sama seperti Abdul Fattah yang sama-sama mengawali karirnya sebagai birokrat. Sebelum menjadi wakil Abdul Fattah, Syahirsah merupakan Kepala Dinas PU Batanghari dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Batanghari. Keduanya kemudian memilih untuk maju dalam pilkada dan terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari periode 2001-2006.

Pada awal kepemimpinan Abdul Fattah dan Syahirsah pada tahun 2001, beberapa tahun setelah krisis ekonomi 1998, Kabupaten Batanghari dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Batanghari menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Provinsi Jambi sebanyak 19,10% dengan pendapatan perkapita masyarakat sebesar Rp. 3.686.618 (BPS 1997 dan 2001). Pasangan ini gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat karena persentase jumlah penduduk miskin di Batanghari tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinannya.

Pada pilkada berikutnya tahun 2005, Abdul Fattah dan Syahirsyah memutuskan berpisah dan saling bertarung untuk kembali mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati dengan pasangan baru. Syahirsah keluar sebagai pemenang bersama Ardian Faisal yang merupakan putra dari Saman Chatib, Bupati Batanghari Periode 1991-2001, mengalahkan Abdul Fattah yang berpasangan dengan Ali Redo.

Pada masa kepemimpinannya, Syahirsah dan Ardian Faisal belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dilihat dari banyaknya jumlah pengangguran di Kabupaten Batanghari yang berada di urutan terbanyak ketiga di Provinsi Jambi. Sebanyak 9.057 penduduk belum mendapat pekerjaan atau menganggur (BPS 2007). Jika dilihat dari laju pertumbuhan pendapatan perkapita selama tahun 2005-2009, Kabupaten Batanghari menempati urutan ke-8 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selama tahun 2005-2009, pertumbuhan perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan terendah terjadi pada tahun 2006 dengan angka sebesar 2.92 persen dibanding tahun sebelumnya (Nurhayati dan Rosmeli 2012).

Berlanjut pada Pilkada 2010, Syahirsah dan Abdul Fattah kembali saling bertarung mencalonkan diri sebagai Bupati Batanghari untuk periode 2011-2016. Pilkada ini diikuti empat pasangan calon, yakni Syahirsah-Erpan, Abdul Fattah-Sinwan, Hamdi Rachman-Juhartono, dan Ardian Faisal-Apani. Abdul Fattah keluar sebagai pemenang dan terpilih kembali sebagai Bupati Batanghari untuk periode keduanya (2011-2016) mengalahkan petahana, Syahirsyah, dengan jumlah suara terbanyak kedua. Kemenangan Abdul Fattah harus ditentukan melalui sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) karena menghadapi gugatan dari pasangan calon Syahirsah-Erpan dan Hamdi Rahman-Juhartono terkait dugaan adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Abdul Fattah dan Sinwan, yakni berupa tindakan politik uang pada masa tenang. Namun, gugatan kedua pasangan tersebut ditolak MK melalui putusan 203/PHPU-D.VIII/2010 dan 204/PHPU-D.VIII/2010 (Mahkamah Konstitusi 2010).

Pasca ditetapkan sebagai bupati terpilih periode 2011-2016, masa jabatan Abdul Fattah tidak berlangsung lama. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2004 sebesar Rp 1,1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa, 26 November 2013. Abdul Fattah dijatuhi vonis hukuman 14 bulan penjara subsider dua bulan kurungan dan denda Rp 50 juta (“Korupsi, Bupati Batanghari Divonis 14 Bulan Bui”). Abdul Fattah kemudian digantikan oleh wakilnya, Sinwan.

Jika dilihat dari visi dan misi yang ditawarkan oleh Abdul Fattah dan Sinwan pada saat pencalonan, program ekonomi rakyat menjadi hal yang utama. Namun, hal tersebut terbukti kembali gagal terwujud setidaknya selama masa jabatannya dalam rentang waktu 2011-2013. Terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Batanghari sebesar 9,56%-10,42% atau berada di urutan terburuk ketiga dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Angka ini terus meningkat pada tahun 2014-2016 menjadi sebesar 10,50% - 10,79% (BPS 2011 dan 2016). Setelah masa jabatan dua periodenya habis, Abdul Fattah kemudian memasang istrinya, Sofia Joesoep, sebagai wakil Syahirsah pada Pilkada Bupati-Wakil Bupati Batanghari Tahun 2015.

Pilkada 2015 rupanya kembali berujung pada penentuan pemenang yang harus ditentukan melalui sidang di MK setelah pasangan Sinwan dan Arzanil menggugat kemenangan pasangan Syahirsah dan Sofia Joesoep. Tetapi, gugatan pasangan yang diusung PAN-PDI perjuangan ini ditolak MK melalui putusan 124/PHP.BUP-XIV/2015 (Mahkamah Konstitusi 2016). Setelah secara resmi terpilih, Syahirsah telah memasuki periode keduanya dalam memimpin Kabupaten Batanghari. Banyak masyarakat yang menaruh kembali harapan besar kepada Syahirsah setelah masa kepemimpinannya (2006-2011) dan kepemimpinan bupati sebelumnya (2011-2015) terbukti belum mampu menyelesaikan masalah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, yakni kemiskinan yang lagi-lagi tidak terjadi mengalami perubahan signifikan, ketimpangan pembangunan dan masalah lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, rilis survey *Public Trust Institute* menunjukkan bahwa sebanyak 53% masyarakat Batanghari tidak puas dengan kepemimpinan Syahirsah (Putin 2020).

Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang memperhatikan selama kurang lebih 20 tahun tersebut secara tidak langsung dimanfaatkan oleh para calon untuk melanggengkan kekuasaan politik. Para calon yang akan bertarung pada pilkada Batanghari 2020 memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat sebagai alat untuk mendulang suara. Secara sosiologis, rasionalitas masyarakat terkait pilihan pasangan calon yang akan memimpin daerahnya teralihkan oleh masalah ekonomi seperti kesulitan pekerjaan yang rata-rata bekerja sebagai petani atau peternak berpenghasilan rendah dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan pendidikan mayoritas tamatan SLTA (Tabel 3 dan Tabel 4). Masyarakat Batanghari cenderung menyukai hal-hal praktis yang akan didapat sesuai kebutuhan mereka seperti mahar politik atau politik uang. Mayoritas masyarakat Batanghari (67%) menerima (dengan pertimbangan) adanya pemberian mahar politik atau politik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Sisanya (33%) tidak menerima karena tidak setuju dengan politik uang (Tabel 5).

Penjelasan di atas menunjukkan beberapa hal. Pertama, adanya fenomena kepemimpinan selama hampir 20 tahun secara bergantian oleh dua tokoh yang melanggengkan jejaring dinasti politik lokal, tidak mendorong terjadinya perubahan pembangunan secara signifikan. Namun, masyarakat masih tetap menerima untuk memilih salah satu di antara mereka ketika masa pemilihan bupati dilaksanakan. Kedua, sebagaimana yang dijelaskan di awal, masyarakat setempat cenderung merawat politik dinasti di Batanghari sehingga tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Budaya masyarakat kiranya telah membentuk perilaku memilih masyarakat yang notabene cenderung masih tradisional. Terakhir, persoalan ekonomi masyarakat menjadi perhatian utama untuk dibenahi seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan formal maupun pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor Perilaku Pemilih

Uraian di atas menunjukkan adanya dimensi sosiologis yang berperan dalam membentuk perilaku memilih masyarakat Batanghari. Tetapi, di sisi lain kami juga menyadari adanya kelemahan dalam hal ekonomi masyarakat. Selain dua hal tersebut, nama Syahirsah dan Fattah dinilai telah terlalu besar dan terlanjur mengakar sehingga dijadikan alasan untuk memilih. Namun, penting untuk disadari pula bahwa politik senantiasa mengalami dinamika. Bisa saja mereka memilih kandidat tersebut karena dinilai menguntungkan individu para pemilih. Pertimbangan untung rugi atas kinerja partai politik dan kandidat juga bisa menjadi pertimbangan seseorang untuk memilih (Aninda 2013).

Realitas yang telah dipaparkan sebelumnya, menurut hemat kami, dapat dijadikan argumen bahwa Pilkada Batanghari 2020 secara tidak langsung menjadi ajang pertarungan kembali dua tokoh dinasti (Syahirsah dan Fattah). Keduanya bertarung melalui representasi masing-masing (Tabel 1) dalam kerangka kekerabatan politik ditambah upaya memperluas dan membangun dinasti politik yang baru di Batanghari.

Bila ditinjau dari segi demokrasi prosedural, realitas ini boleh jadi tidak menjadi masalah. Pada pilkada Batanghari 2020, terdapat tiga pasang calon yang berkontestasi yang secara prosedural tidak menjadi masalah karena terdapat peluang bagi semua pihak untuk berkompetisi dan memberi kesempatan pada rakyat untuk memilih kandidat yang diinginkannya.

Namun, dilihat dari segi lain, sirkulasi elit lokal tidak berjalan secara maksimal karena kursi kepemimpinan hanya berputar pada dua tokoh lama.

Hal ini menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan pada orang-orang tertentu yang secara politis memiliki ikatan darah dengan Syahirsah dan Fattah. Sebagaimana Aninda (2013) mencatat, ketika kekuasaan berputar pada satu titik, kewenangan kepala daerah menjadi sangat politis. Bupati mampu mendistribusikan sumberdayanya pada orang-orang yang loyal kepadanya. Sedangkan lawan politiknya dipastikan tidak mendapatkan apapun dari sang bupati. Pada titik inilah terlihat bahwa sumber daya menjadi instrumen untuk membangun dan memelihara loyalitas. Jika hal ini terus-menerus berjalan, maka kepentingan rakyat rawan untuk ditunggangi oleh para pengabdian sang bupati. Dengan demikian, kepentingan rakyat akan mudah untuk digadaikan oleh pemimpin.

Dalam konteks dinamika dinasti politik Batanghari tersebut, dilihat dari pendekatan sosiologis menurut Kristiadi (1996), perbedaan pemilih berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang, keluarga, kegiatan kelompok secara formal dan informal menjadi sangat signifikan dalam pembentukan perilaku mereka. Mayoritas masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani menjadi cenderung sangat pragmatis dalam memilih. Sebagaimana dikatakan oleh seorang petani karet: “Saya harus pergi bertani setiap hari dan harus menunggu selama kurang lebih dua minggu untuk mendapatkan uang hasil bertani karet. Saya siap libur bertani selama satu hari saja dan memilih kalau besok ada calon yang mau beri kami uang” (Wawancara dengan Mansur, 27 Nopember 2020).

Fenomena ini cenderung akan terus memperburuk kualitas demokrasi di Kabupaten Batanghari. Hal ini terkait dengan sirkulasi kepemimpinan maupun kesadaran partisipasi publik secara nyata dalam konteks pembangunan daerah. Masyarakat seolah tidak peduli siapa dan dari kalangan mana calon pemimpin daerah mereka di masa yang akan datang. Latar belakang ekonomi yang selama ini menjadi permasalahan memaksa masyarakat untuk tidak peduli terhadap figur pasangan calon.

Jika dilihat dari pendekatan psikologis *Michigan Model* (Haryanto 2014) yang menyatakan bahwa keterikatan atau dorongan psikologis dapat membentuk orientasi politik seseorang, maka ikatan psikologis tersebut dalam konteks pilkada Batanghari disebabkan oleh adanya perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat. Sosok Fadhil Arief dan Bakhtiar yang membawa slogan politik “Arah Baru Batanghari” seharusnya menjadi perhatian masyarakat untuk memilih. Keduanya tidak hanya bebas dari afiliasi dinasti politik, tetapi juga pasangan yang kompeten atau

berpengalaman dalam birokrasi dibandingkan dengan pasangan Yuninta-Mahdan dan Firdaus-Camelia yang memanfaatkan kelebihan masing-masing orang tua, suami maupun hubungan keluarga dinasti. Sosok Fadhil yang lugas dalam penyampaian gagasan serta tampil sederhana apa adanya ketika di panggung debat publik justru berbanding terbalik dengan Yuninta dan Firdaus. Hal ini tentu merupakan bagian kecil dari dorongan psikologis yang bisa membentuk perilaku pemilih.

Terakhir, dilihat dari pendekatan *rational choice* (pilihan rasional) di mana pilihan pemilih adalah keputusan rasional yang mempertimbangkan orientasi visi misi, prestasi kandidat, kedudukan, informasi dan popularitas pribadi (Mas'udi dkk. 2018), pada dasarnya masyarakat Batanghari sadar bahwa dinasti politik telah berdiri lama di daerahnya, tetapi mayoritas tidak setuju dengan adanya politik dinasti di Batanghari. Berdasarkan survey terbaru, sebanyak 50,7% masyarakat Batanghari tidak setuju dengan adanya dinasti politik (Tabel 6).

Para kandidat sejatinya sudah siap dan berlomba-lomba mensosialisasikan visi misi dan program kerja kepada masyarakat. Yuninta-Mahdan menggunakan visi "Batanghari Unggul", Firdaus-Camelia dengan visi "Batanghari Berkeadilan dan Sejahtera", dan Fadhil-Bakhtiar dengan visi "Perubahan menuju Arah Baru Batanghari Tangguh 2024". Semua calon hadir dalam kampanye populis untuk masa depan masyarakat Batanghari. Namun, jika dilihat dari persepsi masyarakat yang pragmatis mengenai politik uang yang mencapai total 67% (Tabel 5), konsep pendekatan rasional ini akan cenderung terabaikan.

Politik kekerabatan melalui dinasti politik mengabaikan prinsip-prinsip pemilihan umum yang adil. Para kerabat yang menggantikan posisi petahana ataupun ingin mengambil kembali posisi lama (bupati/wakil bupati) yang pernah ditempatkan oleh istri, anak, ataupun saudara sudah pasti akan mengambil manfaat, sekurang-kurangnya mencari popularitas. Pasangan Firdaus-Camelia, misalnya, menonjolkan nama Fattah dan Hasip di belakang nama mereka dan tentunya tidak asing lagi di telinga masyarakat Batanghari. Sementara nama Yuninta dan Mahdan dengan sendirinya telah dikemas sebagai istri dan adik ipar Bupati Batanghari sebelumnya.

Selain itu, Aninda (2013) mencatat bahwa dinasti politik dalam proses pencalonan juga dapat merusak sistem kaderisasi partai politik. Penguatan institusionalisasi politik kepartaian menjadi terhambat karena peluang kader-kader terbaik partai diambil alih para kerabat yang dari segi kuantitas kaderisasi maupun kualitas sebenarnya belum memenuhi

persyaratan. Firdaus yang berasal dari latar belakang seorang dokter harus maju sebagai calon bupati menggantikan adiknya yang merupakan Ketua DPD PAN Batanghari, sedangkan Camelia diusung oleh partai yang ia pimpin, yakni Partai Demokrat.

Kemudian, pasangan Yuninta-Mahdan selain diusung oleh PDIP, Gerindra dan Perindo juga diusung oleh salah satu partai besutan suami Yuninta, yakni partai Golkar. Jika realitas seperti ini terus berkembang dan meluas di Batanghari, maka Batanghari di masa mendatang akan mengalami kemandegan sirkulasi kepemimpinan yang menghambat kemajuan daerahnya.

Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa dinasti politik yang telah lama mengakar di Kabupaten Batanghari tidak hanya terkait faktor sosial-budaya, tetapi juga keadaan ekonomi masyarakat. Upaya pelanggaran dinasti politik dan pembangunan dinasti politik baru menjadi salah satu implikasinya. Keadaan seperti ini tentu saja akan membuat aspek kapabilitas dan kualitas dalam memilih pemimpin cenderung terabaikan. Masyarakat Batanghari yang secara kultur masih tradisional cenderung pragmatis dalam menggunakan hak pilih. Pendekatan perilaku pemilih secara sosiologis dapat menggambarkan realitas masyarakat Batanghari dalam proses pemilihan pemimpin mereka. Karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah setempat untuk lebih intensif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia baik pendapatan perkapita maupun sektor pendidikan. Selain itu, pragmatisme masyarakat dalam pilkada juga disebabkan oleh kegagalan partai politik dalam melakukan proses kaderisasi kepemimpinan. Perlu adanya perhatian khusus, desakan publik dan evaluasi dalam proses rekrutmen kader partai politik berdasarkan sistem kepatutan (*merit system*) tanpa melihat latar belakang calon kader sehingga nantinya muncul calon pemimpin yang kompeten dalam politik. Selain itu, penting juga meningkatkan pendidikan politik masyarakat Batanghari secara massif yang disosialisasikan hingga ke tingkat akar rumput.

Referensi

- “290 Calon Petahana Maju Pilkada di 236 Daerah”. Diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201001093637-20-553036/290-calon-petahana-maju-pilkada-di-236-daerah>)
- Aninda, Resiana Dina. 2013. “Pelanggaran Politik Dinasti “Samawi”: Sebuah Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis pada Pilkada Bantul 2010”. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 3(2):15-28.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka dan Pusat studi demokrasi dan HAM (PUSDEHAM).
- Bartels, Larry M. 2010. “The Study of Electoral Behavior”. Dalam *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavioral*, edited by Jan E. Leighley. Oxford: Oxford University Press.
- Besley, Timothy and Marta Reynal-Querol. 2013. “Selection via Dynasties: Theory and Evidence”. Diakses dari ([http://84.89.132.1/~reynal/dynasties_new_draft_131024\[1\]_ALL.pdf](http://84.89.132.1/~reynal/dynasties_new_draft_131024[1]_ALL.pdf))
- Bo, Ernesto Dal, Pedro Dal Bo, and Jason Snyder. 2009. “Political Dynasties”. *The Review of Economic Studies* 76(1):115-142.
- BPS. 2001. *Persentase Penduduk Miskin Tahun 2002-2004*. Batanghari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari.
- BPS. 2007. *Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan*. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- BPS. 2016. *Persentase Penduduk Miskin 2011-2016*. Batanghari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari.
- BPS. 2019. *Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Batanghari*. Jambi: Badan Pusat Statistik Povinsi Jambi.
- Buehler, Michael and Paige Tan. 2007. “Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province”. *Indonesia* 84: 41-69.
- Diskominfo. 2012. *Sejarah Singkat Kabupaten Batanghari*. Batanghari: Situs Pemerintah Kabupaten Batanghari.
- Effendi, Winda Roselina. 2018. “Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten”. *Jurnal Trias Politika* 2(2):233-247.

- Feinstein, Brian D. 2010. "The Dynasty Advantage: Family Ties in Congressional Elections". *Legislative Studies Quarterly* 35 (4): 571-598.
- Geys, Benyy and Daniel M. Smith. 2017. "Political Dynasties on Democracies: Causes, Consequences And Remaining Puzzles". *The Economic Journal* 127(605): 447-454.
- Hamid, Abdul. 2015. "Observation of Democratic Decentralization in Indonesia During 2009-20014: Political Dynasty in Banten Province and Populism in Jakarta Province". *Dissertation*, Doshisha University, Japan.
- Hanafi, Ridho Imawan. 2014. "Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik". *Jurnal Penelitian Politik* 11(2): 1-16.
- Haryanto. 2014. "Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17(3): 291-308.
- Hutabarat, Melvin P. 2012. "Fenomena "Orang Kuat Lokal" di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan". Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Kenawas, Yoes C. 2014. "The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society. *Arryaman Fellow Research Paper*.
- "Korupsi, Bupati Batanghari Divonis 14 Bulan Bui." Diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/532691/korupsi-bupati-batanghari-divonis-14-bulan-bui>)
- Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Risalah Sidang*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkaman Konstitusi. 2016. *Putusan Persidangan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mas'udi, Umi Qodarsasi, and Nevy Rusmarina Dewi. 2018. "Perilaku Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018". *Jurnal Sosiologi Walisongo* 2(2):169-188.
- Mujani, Saiful, R. William Liddle and Kuskridho Ambardi. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Mizan Media Utama (MMU).

- Nurhayani and Rosmeli. 2012. Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Batanghari. *Jurnal Paradigma Ekonomika* 12(1): 8-14.
- Prianto, Budhi. 2016. "Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Desentralisasi". *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1(2): 105-117.
- Public Trust Institute (Putin). 2020. *Perilaku Memilih dalam Menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari 2020*. Jambi: Public Trust Institute.
- Querubin, Pablo. 2011. "Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in The Philippines".
- Suaib, Eka dan La Husen Zuada. 2015. "Fenomena 'Bosisme Lokal' di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara". *Jurnal Penelitian Politik* 12(2): 51-69.
- Sukri, Mhd Al Fajri. 2020. "Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat". *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10(2):169-190.
- Surbakti, Ramlan. 2003. "Perkembangan Partai Politik di Indonesia". Hal. 51-66 dalam *Indonesia in Transition: Work in Progress*, edited by Henk Schulte Nordholt dan Gusti Asnan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutisna, Agus. 2017. "Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah". *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2(2):101-120.
- Wawancara dengan Mansur, 27 Nopember 2020.

Tabel 1
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari Tahun 2020

Nama	Status Keluarga	Jabatan Politik
Yunninta Asmara	Istri Syahirsyah (Bupati Batanghari Periode 2006-2011 dan 2016-2021)	Wakil Ketua I DPRD Batanghari (2019-2024) Wakil Ketua DPRD Batanghari (2009-2014) Ketua DPC Partai Bintang Reformasi Calon Bupati Batanghari (2020-2025)
M. Mahdan	Adik Ipar Sinwan (Wakil Bupati Batanghari 2011-2013 dan Bupati Batanghari 2013-2016)	Komisi I DPRD Batanghari (2019-2024) Ketua DPRD Batanghari (2014-2019) Calon Wakil Bupati Batanghari (2020-2025)
Firdaus Fattah	Anak Abdul Fattah (Bupati Batanghari Periode 2001-2006 dan 2011-2013) Anak Hj. Sofia Joesoep (Wakil Bupati Batanghari Periode 2016-2021) Kakak kandung Hafiz Fattah (Ketua DPC PAN Batanghari)	Calon Bupati Batanghari (2020-2025)
Camelia Puji Astuti	Anak Hasip Kalimuddin Syam (Bupati Batanghari periode 1980-1991 dan Wakil Gubernur Jambi 1994-2004)	Ketua DPC Demokrat Batanghari Komisi 1 DPRD Batanghari (2019-2024) Calon Wakil Bupati Batanghari (2020-2025)

Fadhil Arief	Cucu Ulama Besar Batanghari Jambi, Haji Syukur	Camat Maro Sebo Ilir; Sekretaris Dinas Perkebunan Batanghari; Kepala Dinas Pendapatan Daerah Batanghari; Kepala Dinas PMD Batanghari; Plt Sekda Batanghari; Sekda Muaro Jambi; Calon Bupati Batanghari (2020-2025)
Bakhtiar		Sekda Batanghari; Calon Wakil Bupati Batanghari (2020-2025)

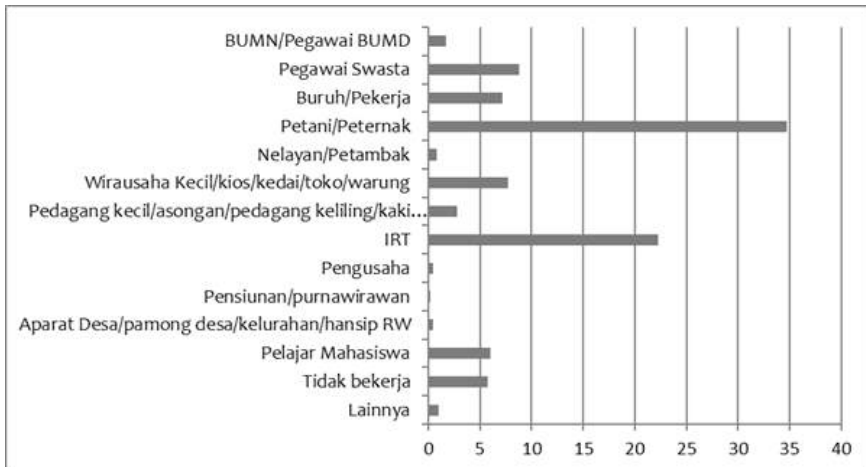
Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel 2
Daftar Bupati dan Wakil Bupati Batanghari (2001-2021)

Bupati	Wakil Bupati	Periode
H. Abdul Fattah	Ir. Syahirsah	2001-2006
Ir. Syahirsah	H. Ardian Faisal	2006-2011
H. Abdul Fattah	Sinwan S.H	2011-2013
Sinwan S.H	-	2013-2016
Ir. Syahirsah	Hj. Sofia Joesoef S.H	2016-2021

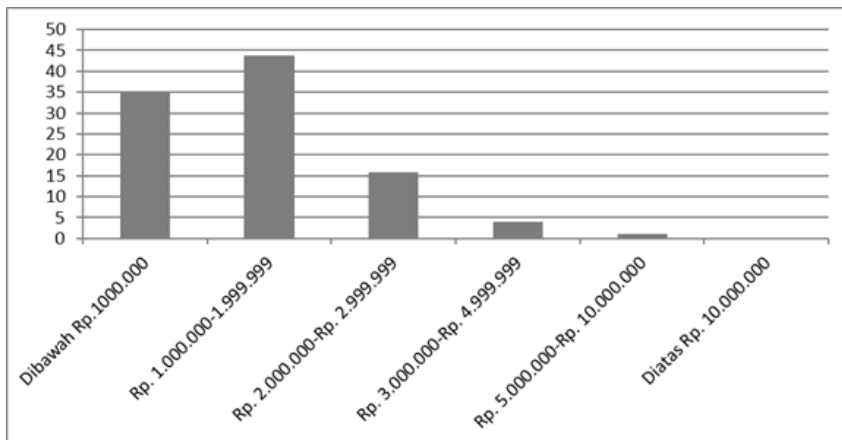
Sumber: Diskominfo Kabupaten Batanghari

Tabel 3
Pekerjaan Masyarakat Batanghari



Sumber: Public Trus Institute (Putin)

Tabel 4
Rata-rata Pendapatan Masyarakat Batanghari



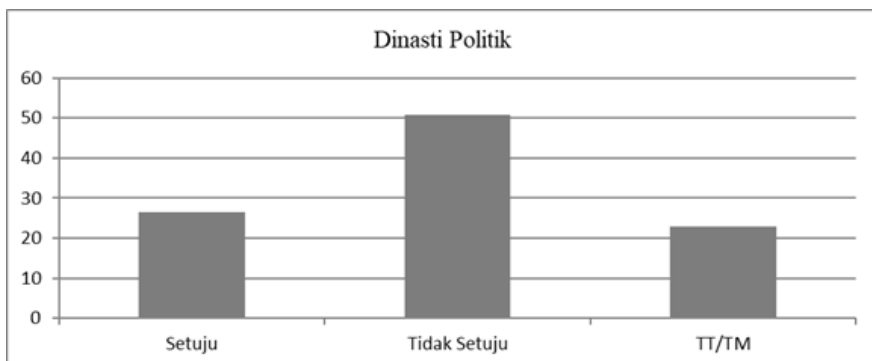
Sumber: Public Trus Institute (Putin)

Tabel 5
Persepsi Masyarakat Batanghari mengenai Politik Uang



Sumber: Public Trust Institute (Putin)

Tabel 6
Persepsi Masyarakat Batanghari Terhadap Dinasti Politik



Sumber: Public Trust Institute (Putin)